

BAB IV

ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Tegal, adalah sebagai berikut :

4.1.1 Kemiskinan

Permasalahan besar bagi semua daerah adalah menurunkan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2009-2012) menunjukkan tren positif atau dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Tercatat pada Tahun 2009 sebanyak 195.500 jiwa (13,98 %), Tahun 2010 turun menjadi sebanyak 182.542 jiwa (13,11%), kemudian Tahun 2011 turun lagi menjadi 161.116 jiwa (11,54%), dan pada Tahun 2012 jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan menjadi 152.758 jiwa atau 10,75%. Persentase angka kemiskinan tersebut masih dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah (14,98%), dan persentase penduduk miskin Nasional (11,66%). Perbandingan persentase angka kemiskinan antara Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 4.1 halaman IV-2.

Meskipun persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal pada Tahun 2012 dibawah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, bukanlah berarti kemiskinan tidak lagi menjadi permasalahan di Kabupaten Tegal. Sebab dalam rentang waktu 4 tahun terakhir persentase penurunan angka kemiskinan per tahun rata-rata baru sebesar 1,08%. Belum optimalnya tingkat capaian penurunan angka kemiskinan tersebut, diantaranya dikarenakan kurang dipedomaninya dokumen Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Tegal oleh segenap pemangku kepentingan, sehingga belum sepenuhnya terbangun sinergitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh SKPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itulah, kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tantangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin masih menjadi salah satu prioritas kebijakan pembangunan di Kabupaten Tegal.



Gambar 4.1 : Persentase Penduduk Miskin perbandingan Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2013

4.1.2 Pengangguran

Penduduk di Kabupaten Tegal didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun dimana tenaga kerja tersedia secara melimpah. Bahkan, banyak masyarakat Kabupaten Tegal yang merantau di daerah lain untuk bekerja. Kondisi ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal, karena jika tidak dapat dimanfaatkan justru akan menjadi beban. Penduduk usia produktif 15-64 tahun, yang melimpah akan menyediakan jumlah tenaga kerja potensial yang relatif murah, tetapi pemanfaatan yang kurang baik justru akan menambah jumlah pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tegal tahun 2009-2013 cenderung fluktuatif dengan paling tinggi pada tahun 2011 yaitu 90,12% dan terendah tahun 2013 sebesar 62,89%. Dari data TPAK menunjukkan sebagian besar dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam usaha produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa untuk kurun waktu tertentu.

Terkait dengan tingkat pengangguran terbuka, dari kurun waktu Tahun 2009-2013 cenderung mengalami penurunan dan dengan angka

tertinggi yaitu pada tahun 2009 pada angka 7,30% dan terendah pada tahun 2013 yaitu pada angka 4,36%. Pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas, karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tingginya angka tingkat pengangguran terbuka, maka semakin besar pula potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, diantaranya kriminalitas. Tingginya tingkat pengangguran dikarenakan terbatasnya lapangan kerja, rendahnya/tidak dimilikinya ketrampilan sesuai tuntutan pekerjaan, keterbatasan modal usaha, dan rendahnya minat angkatan kerja muda di sektor pertanian yang berpotensi menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, penanganan masalah pengangguran akan menjadi prioritas dalam program pembangunan di Kabupaten Tegal untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4.1.3 Kualitas Pelayanan Publik

a. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi, karena menyangkut hajat hidup seluruh warga negara mulai lahir hingga menemui ajalnya. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mewajibkan setiap warga negara untuk memiliki dokumen kependudukan, yang nantinya berguna untuk memenuhi berbagai persyaratan dan kewajiban dalam berbagai aktivitas, seperti bersekolah, bepergian keluar negeri, mencari pekerjaan, menikah dan kepentingan lainnya.

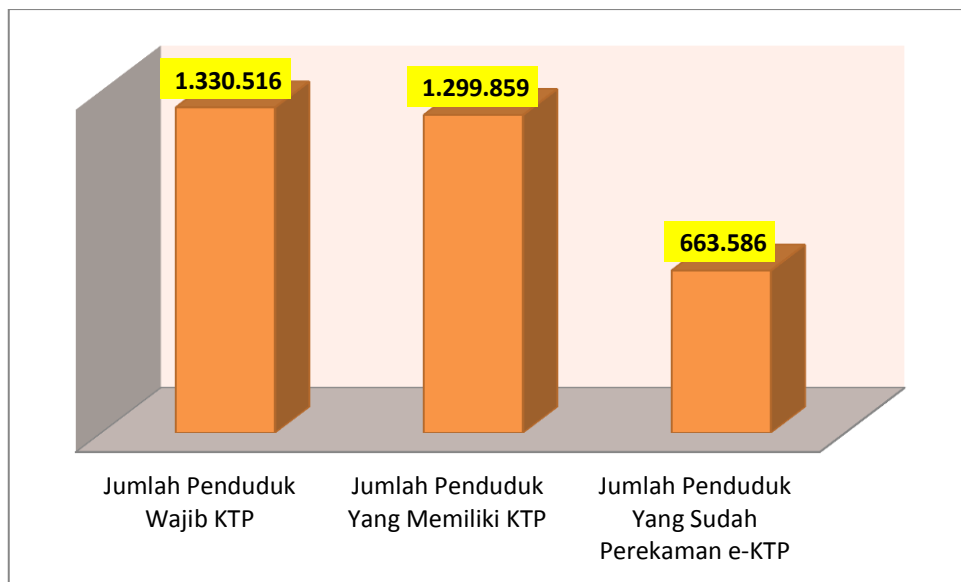
Mengingat strategisnya urusan administrasi kependudukan, maka Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara berkualitas. Kendala-kendala teknis bagi masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan dapat dieliminasi, sehingga pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mudah, murah dan tidak bertele-tele.

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan harus memperhatikan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/ Kota, Pemerintah telah menetapkan target-target capaian SPM bidang administrasi kependudukan yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, yang meliputi sejumlah indikator sebagai berikut :

1) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.

Cakupan penerbitan KTP ditargetkan 100% pada Tahun 2015. Namun di Kabupaten Tegal sampai dengan Tahun 2013 dari 1.299.859 jiwa penduduk yang memiliki KTP, baru sebanyak 663.586 penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini.



Gambar 4.2 : Cakupan Kepemilikan KTP di Kabupaten Tegal, Tahun 2013

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, Tahun 2013

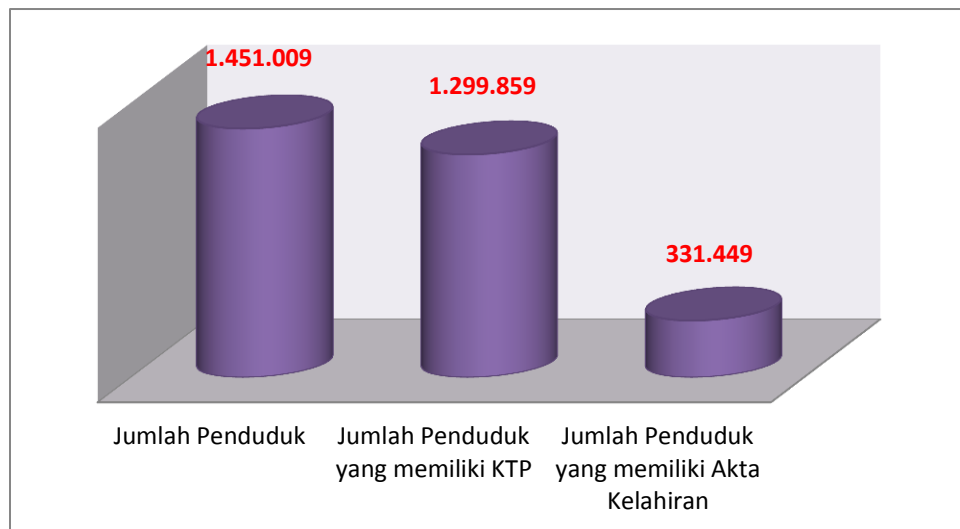
2) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi

kependudukan. Cakupan penerbitan KK telah ditetapkan target capaiannya sebesar 100% pada Tahun 2015. Pada tahun 2013 jumlah penerbitan KK 87.467. Jumlah penerbitan KK di Kabupaten Tegal dari tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah meningkat. Pada tahun 2009 jumlahnya 30.697 kemudian meningkat menjadi 32.735 pada tahun 2010, dan mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2011 yaitu 58.308 dan tahun 2012 sebesar 87.647.

3) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

Penerbitan kutipan akta kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan akta kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran telah ditetapkan target capaiannya sebesar 90% pada Tahun 2020. Perkembangan layanan penerbitan kutipan akta kelahiran di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Terdata pada Tahun 2009 sebanyak 217.804, pada Tahun 2013 sebanyak 331.449 orang. Namun demikian, jika disandingkan dengan penduduk di Kabupaten Tegal yang jumlahnya sebanyak 1.451.009 jiwa, maka cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran masihlah sangat kecil. Data perbandingan kepemilikan KTP dan Kutipan Akta Kelahiran, dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut.



Gambar 4.3 : Tingkat Perbandingan Kepemilikan KTP dan Akta Kelahiran Di Kabupaten Tegal Tahun 2013

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2013

4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Penerbitan kutipan akta kematian adalah pelayanan terhadap keluarga penduduk yang mengajukan penerbitan kutipan akta kematian paling lambat 30 hari sejak peristiwa kematian dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota menerbitkan kutipan akta kematian berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian, oleh Pemerintah telah ditetapkan target capaiannya sebesar 70% pada Tahun 2020.

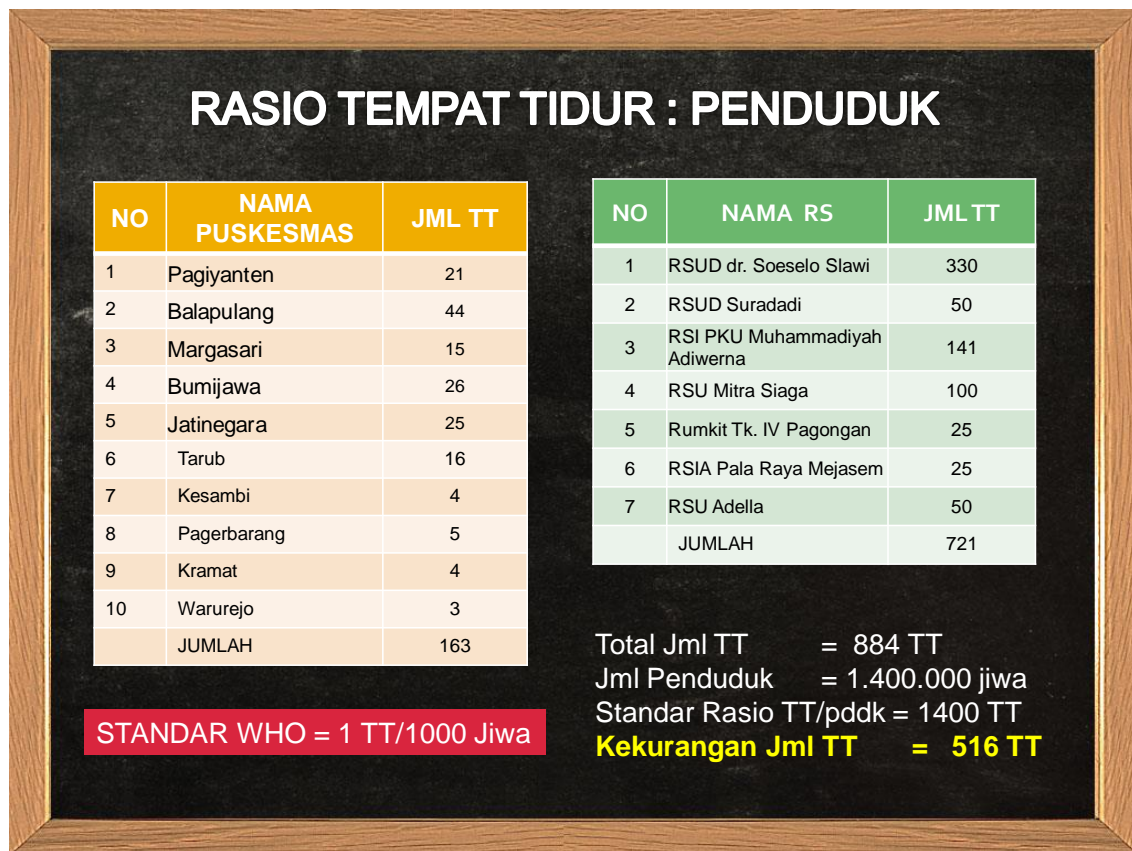
Masih rendahnya tingkat capaian SPM bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tegal menunjukkan rendahnya pula kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kualitas pelayanan di bidang administrasi dokumen kependudukan. Hal tersebut disebabkan karena penyelenggara pelayanan dihadapkan pada persoalan keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang memadai, maupun sumberdaya finansial.

b. Pelayanan Kesehatan Dasar

Beberapa indikator pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2009-2013 masih menunjukkan pada tingkat yang rendah, antara lain nampak dari :

- 1) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) persatuan Balita Jumlah Posyandu di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 1.517 buah dan jumlah Balita sebanyak 120.121 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 1:79. Hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu di Kabupaten Tegal melayani 79 balita.
- 2) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten pada tahun 2012 mencapai 1 : 399. Ini artinya bahwa 1 Puskemas/Poliklinik/Pustu harus melayani jumlah penduduk sebanyak 399 jiwa.
- 3) Masih tingginya jumlah kematian ibu melahirkan. Tindakan preventif untuk menangani permasalahan kematian ibu melahirkan dan bayi yang dilahirkan, perlu mendapat perhatian yang prioritas mengingat di Kabupaten Tegal dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 justru angka kematian meningkat. Pada tahun 2009 jumlah kematian ibu melahirkan sebanyak 14 kejadian sedangkan pada Tahun 2013 justru meningkat sangat tinggi dengan jumlah kematian ibu melahirkan sebanyak 42 kejadian.

- 4) Masih tingginya jumlah kematian bayi. Hal ini ditunjukkan dari data jumlah kematian bayi dimana pada tahun 2009 mencapai 178 sedangkan pada Tahun 2013 meningkat sampai dengan angka 256.
- 5) Rendahnya tingkat pelayanan di rumah sakit dan Puskesmas. Rasio tempat tidur yang tersedia 7 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta serta 10 Puskesmas Rawat di Kabupaten Tegal dapat dilihat dari total jumlah tempat tidur yang ada yaitu sebanyak 884 tempat tidur dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tegal yang sebanyak 1,4 juta jiwa, jika berpedoman pada standar WHO dimana 1 tempat tidur untuk melayani 1000 penduduk, maka standar rasionya adalah 1400 tempat tidur atau masih ada kekurangan jumlah tempat tidur sebanyak 516 tempat tidur. Data rasio tempat tidur dimaksud dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut ini.



Gambar 4.4 : Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit / Puskesmas Rawat Inap terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Tegal, Tahun 2013

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Tahun 2014

Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dikarenakan terbatasnya dukungan dana dan fasilitas/ sarana dan prasarana kesehatan. Penyebab lainnya yang tidak kalah penting adalah dukungan sumberdaya manusia bidang kesehatan yang belum memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

c. Pelayanan Dasar Pendidikan

Beberapa indikator pelayanan dasar pendidikan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2009-2013 masih menunjukkan pada tingkat yang rendah, antara lain dapat dicermati dari :

1) Masih cukup tinggi Persentase Kondisi Ruang Kelas yang rusak.

Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2013, kondisi ruang kelas SD/MI sebesar 89% dalam kondisi baik atau 11% masih dalam kondisi rusak dari 5.722 ruang kelas seluruhnya. Kondisi ruang kelas SMP/MTs yang masih dalam kondisi rusak sebanyak 19% dari 2.753 ruang kelas seluruhnya, sedangkan kondisi ruang kelas SMA/MA yang masih dalam kondisi rusak sebanyak 16% dari 1.120 ruang kelas seluruhnya.

2) Angka Putus Sekolah yang masih memerlukan perhatian.

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/ tidaknya pembangunan di bidang pendidikan.

Data yang ada menunjukkan bahwa angka putus sekolah SD/ MI di Kabupaten Tegal dalam kategori cukup rendah, tidak mencapai 1%. Namun demikian, Angka putus sekolah pada tingkat SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 1,61 atau mengalami peningkatan sebesar 0,88 dari tahun 2012. Angka putus sekolah pada tingkat SMA/ MA/ SMK mengalami peningkatan yang cukup signifikan pula pada tahun 2010 ke 2011, yaitu sebesar 0,05%. Walaupun angka putus sekolah Tingkat SMA/MA/SMK pada Tahun 2013 hanya sebesar 0,50 tetapi jumlah siswa SMA/MA/SMK hanya bertambah sebanyak 10.859 siswa dibanding Tahun 2012, sangat jauh berbeda dengan jumlah siswa SMP/MTs yang mengalami kenaikan jumlah siswa dimana pada Tahun 2012 sebanyak 45.100 siswa menjadi 80.136 siswa pada Tahun 2013. Rendahnya jumlah siswa SMA/MA/SMK dan masih cukup tingginya angka putus sekolah ini dapat disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan pada tingkat SMA/MA/SMK sehingga sejumlah siswa di

Kabupaten Tegal yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau mengalami putus sekolah.

- 3) Kurangnya keberpihakan Pendidikan untuk masyarakat tidak mampu. Hal tersebut dapat dilihat dari belum terpenuhinya sasaran pemberian dana beasiswa. Jika dilihat dari besaran alokasi dan jumlah penerima beasiswa dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan jumlah sasaran siswa miskin yang seharusnya menerima masih belum sesuai harapan. Demikian pula dalam penentuan sasaran penerima bantuan beasiswa miskin, masih banyak yang harus dievaluasi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan beasiswa miskin.

Sederet permasalahan pelayanan pendidikan dasar tersebut di atas, dikarenakan beberapa hal, antara lain: belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar, terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga kependidikan, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan, utamanya dari keluarga kurang mampu, serta kondisi sekolah yang kurang representatif.

4.1.4 Infratraktur Jalan

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi, dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak sedang, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Tegal mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2009 proporsi jalan kondisi baik mencapai 41,84%, pada Tahun 2010 naik menjadi 44,99%, namun pada Tahun 2011 kondisi tersebut turun menjadi 42,55%, pada Tahun 2012 naik kembali menjadi 49,60%, akan tetapi pada Tahun 2013 turun menjadi 43,04%. Demikian halnya dengan proporsi jalan kondisi rusak berat mengalami peningkatan, yaitu dari 10,08% pada Tahun 2009 menjadi 22,95% pada Tahun 2010. Kondisi pada Tahun 2013 mengalami penurunan prosentase jalan kondisi rusak berat yaitu menjadi 7,14%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kondisi jalan yang baik sebesar sebanyak 43,04%, maka kondisi jalan rusak, baik kategori sedang maupun berat di Kabupaten Tegal pada Tahun 2013 lebih dari setengah dari jalan yang ada atau tepatnya 56,96% dari seluruh jalan Kabupaten yang ada. Rendahnya kualitas infrastruktur jalan tersebut, lebih dikarenakan keterbatasan sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia untuk bisa melakukan pemeliharaan berkala yang tidak sebanding dengan panjangnya infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tegal.

4.1.5 Pengelolaan Kepegawaian

Rendahnya kinerja sebuah instansi atau unit kerja seringkali berujung pada permasalahan sumber daya manusia. Alasan yang

dikemukakan oleh SKPD seringkali akibat permasalahan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada. Belum dimilikinya *road map* kepegawaian menjadi salah satu sebab belum terencana dan terpetakan dengan baik antara permasalahan yang ada dengan solusi kebijakan yang harus diambil untuk kurun waktu tertentu. Kelengkapan pembinaan kepegawaian membutuhkan beberapa instrumen yang sampai sekarang belum dimiliki atau jika sudah dimiliki tetapi belum dimanfaatkan, antara lain: pemetaan kompetensi pegawai, belum melakukan seleksi terbuka penempatan jabatan, penataan pegawai tidak sesuai dengan kompetensinya, belum tersusunnya data profil pegawai secara baik, belum dimanfaatkan secara optimal dokumen kompetensi jabatan, tingkat pelanggaran disiplin pegawai cenderung meningkat, dan belum diterapkan sistem *reward and punishment*. Hal ini menunjukkan bahwa penataan sistem manajemen sumberdaya manusia belum berjalan dengan baik.

4.1.6 Kondisi Pasar Tradisional

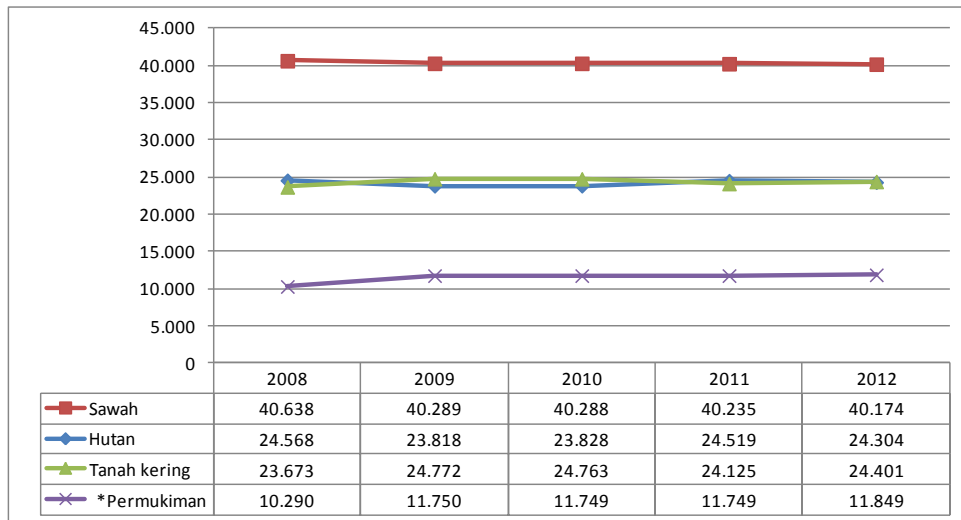
Di Kabupaten Tegal terdapat 27 Pasar yang tersebar di seluruh Kabupaten Tegal. Namun demikian persebaran pasar sampai dengan saat ini belum merata, masih ada 3 (tiga) kecamatan yang di wilayahnya tidak terdapat pasar yaitu Kecamatan Pagerbarang, Dukuhwaru dan Tarub. Sebanyak 27 pasar tersebut dikelola oleh 6 UPTD Pasar. Adapun kondisinya sebanyak 26 pasar tidak representatif dan hanya 1 Pasar yang representatif yaitu Pasar Trayeman di Kecamatan Slawi.

Kondisi pasar tradisional yang tidak representatif tersebut, dikarenakan keterbatasan sumber dana untuk rehabilitasi pasar. Disamping itu, manajemen pasar kurang diperhatikan oleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dalam 5 (lima) tahun ke depan, perlu menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mewujudkan pembangunan Pasar Tradisional Modern. Sehingga pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar modern (ritel), dan tetap diminati masyarakat.

4.1.7 Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Data series dari 2008-2012 menunjukkan bahwa luasan sawah terus mengalami penurunan, sedangkan luasan permukiman mengalami kenaikan. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat tren yang terjadi adalah maraknya konversi dari lahan pertanian subur beririgasi teknis menjadi lahan permukiman. Jika hal ini terjadi pada daerah hulu dan menutup saluran irigasi, maka sawah pada daerah hilir akan otomatis mati. Dengan adanya kebijakan lahan sawah berkelanjutan dan prioritas untuk menguatkan ketahanan pangan, isu konversi lahan ini sepatutnya menjadi hal yang diprioritaskan penanganannya.

Alih fungsi lahan pertanian tersebut terjadi, karena lemahnya fungsi pengendalian dan penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tegal belum memiliki kebijakan lahan sawah berkelanjutan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan lahan sawah berkelanjutan, guna penguatan ketahanan pangan. Data pemanfaatan lahan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut ini.



Gambar 4.5 : Data Pemanfaatan lahan Tahun 2008-2012 Kabupaten Tegal

Sumber: SIPD Kabupaten Tegal, 2012

4.2. Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Tegal dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.

Isu-isu strategis Kabupaten Tegal tidak terlepas dari isu-isu Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional dan Propinsi serta RPJP Kabupaten Tegal 2005-2025, secara berjenjang penyusunan isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019 adalah dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. RPJP Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal
2. RPJM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal
3. RTR Nasional; RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten Tegal

Selain melakukan kajian terhadap dokumen tersebut diatas, penggalan isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 dilakukan dengan metodologi kajian data dan informasi serta *focus group discussion* dengan Tokoh Masyarakat yang berasal dari wilayah dengan karakteristik pertanian, perkotaan dan pesisir di Kabupaten Tegal. Dari hasil olah data informasi dan curah pendapat dari berbagai pihak yang menjadi narasumber, maka dihasilkan inventarisasi isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

4.2.1 Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pendidikan adalah investasi sumberdaya manusia dalam jangka panjang, yang baru dapat dirasakan 20 tahun ke depan. Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan bahwa pendidikan merupakan hal yang menjadi landasan pembangunan, dan mengalokasikan dana pembangunan minimal 20% untuk mendukung pendidikan. Teori ekonomi mengemukakan bahwa investasi dalam pendidikan akan mengurangi pendapatan selama sekitar 5 tahun awal, tetapi akan meningkatkan pendapatan obyek pendidikan sehingga melebihi (dan dapat menutup) investasi awal yang telah ditanamkan. Dalam kalimat sederhana, pendidikan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten Tegal maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna terselenggaranya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat. Beberapa permasalahan dan potensi yang terkait pendidikan antara lain adalah perlunya perhatian terhadap kesejahteraan guru swasta dan guru tidak tetap; Pelaksanaan Wajar Dikdas belum tuntas karena masih tingginya angka putus sekolah tingkat SD dan SMP, terutama di wilayah perdesaan dan perkotaan khususnya wilayah industri, distribusi guru belum merata, pengelolaan pendidikan non formal dan informal belum maksimal untuk menampung angka putus sekolah.

4.2.2 Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan –bersama pendidikan— adalah investasi sumberdaya manusia dalam jangka panjang, yang baru dapat dirasakan 20 tahun ke depan. Kondisi kesehatan yang baik akan dapat meingkatkan produktivitas kerja, sedangkan kondisi kesehatan yang buruk akan menurunkan produktivitas, bahkan berpotensi menjadi beban karena memerlukan usaha penyembuhan. Salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan kualitas pembangunan kesehatan. Peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tegal khususnya masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tegal. Pelayanan kesehatan terdiri dari 4 aspek yaitu preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. Aspek preventif berarti pencegahan terhadap penyakit, terutama pada masyarakat yang berisiko tinggi. Aspek kuratif yaitu usaha penyembuhan dari penyakit yang menyerang. Aspek promotif adalah usaha meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, terutama pada masyarakat yang sehat. Aspek rehabilitatif adalah usaha pemulihan dari penyakit dengan tujuan mencapai kualitas hidup yang sama dengan saat sebelum terkena penyakit.

Beberapa hal yang menjadi isu dalam pembangunan kesehatan masyarakat antara lain perhatian terhadap pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat yang selama ini belum berjalan dengan optimal. Hal lain adalah masih tingginya angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Tegal. Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari selama melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Data lain terlihat dari masih tingginya angka kematian bayi. Hal ini ditunjukkan dari data angka kematian bayi per 1000 kelahiran, pada tahun 2009 pada angka 6,56 sedangkan pada Tahun 2013 meningkat sampai dengan angka 8,94.

Pembangunan kesehatan masyarakat perlu difokuskan pada peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan atas apa yang akan dicapai itu akan diformulasikan dalam bentuk kebijakan yang bermuara pada perbaikan gizi masyarakat melalui penumbuhan prakarsa masyarakat, layanan kesehatan keliling, dan program kesehatan ibu dan anak serta meningkatkan kampanye budaya hidup bersih dengan semakin memaksimalkan layanan kesehatan keliling dengan orientasi preventif di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.

4.2.3 Peningkatan Kualitas Permukiman dan Lingkungan Perumahan

Dalam memenuhi kebutuhan akan lingkungan perumahan perlu diupayakan pembangunan perumahan pada kawasan baru maupun pada kawasan terbangun yang pelaksanaannya disesuaikan dengan daya dukung lingkungan setempat. Khusus untuk kawasan terbangun yang kumuh perlu diupayakan peningkatan kualitas huniannya serta prasarana sarana lingkungannya. Penerapan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali yang dilakukan secara sistematis merupakan upaya untuk peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman khususnya di area perkotaan.

Untuk mewujudkan hal tersebut harus dilakukan peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan sistem informasi dan teknologi serta penegakan hukum, serta menerapkan prinsip-prinsip urban management sesuai dengan kondisi setempat. Disamping juga perlu adanya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat, kerjasama dengan lembaga keuangan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan kerangka kerjasama lainnya dalam mewujudkan upaya-upaya tersebut. Beberapa permasalahan dan potensi terkait permukiman dan lingkungan perumahan antara lain masih banyaknya lingkungan pemukiman yang kurang sehat; masih banyaknya pemukiman yang tidak layak huni dan kumuh; perlu perhatian terhadap sanitasi dan drainase di lingkungan pemukiman; dan kurangnya area hijau sebagai resapan air di lingkungan pemukiman khususnya di perkotaan.

4.2.4 Penguatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah

Pengembangan sarana dan infrastruktur adalah dalam rangka memperkuat pondasi kewilayahan yang mengutamakan pada pemenuhan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan karakteristik kewilayahan Kabupaten Tegal. Disisi lain pengembangan sistem transportasi merupakan salah satu kebutuhan utama yang perlu diperhatikan sebagai pendukung utama pengembangan kewilayahan dalam pembangunan daerah akibat

meningkatkan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari dan ke wilayah luar Kabupaten Tegal yang juga semakin meningkat perlu pengembangan sarana dan prasarana serta sistem transportasi terpadu untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa serta peningkatan aksesibilitas bagi manusia ataupun barang dan jasa.

Beberapa masalah dan potensi terkait sarana prasarana dan infrastruktur wilayah antara lain masih kurang memadainya infrastruktur yang mendukung pertanian (khususnya pertanian wilayah utara Kabupaten Tegal), perlu perhatian terhadap irigasi tersier yang menjadi kewenangan dari P3A. Isu yang lain adalah masih tingginya kerusakan jaringan jalan kabupaten antar wilayah kecamatan. Kondisi jalan rusak, baik kategori sedang maupun berat di Kabupaten Tegal pada Tahun 2013 lebih dari setengah dari jalan yang ada atau tepatnya 56,96% dari seluruh jalan Kabupaten yang ada. Kurang memadainya akses jalan pada beberapa titik wilayah di Kabupaten Tegal yang berakibat rawan kemacetan (di pasar Pagongan, Suradadi, Lebaksiu, dan Bojong). Hal lain yang menjadi isu sarana prasarana infrastruktur wilayah adalah masih terdapat kesenjangan kelengkapan sarana prasarana dan kondisi infrastruktur jalan khususnya di wilayah perbatasan antara Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

4.2.5 Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengendalian pemanfaatan kawasan dalam rangka mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas adalah dalam rangka mengoptimalkan Kelestarian lingkungan hidup. Diperlukan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang dan zonasi yang dapat menjadi acuan dalam membangun kawasan ruang yang tersedia dengan mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan infrastruktur dan pengembangan lingkungan kawasan. Peningkatan kerentanan kondisi lingkungan di Kabupaten Tegal khususnya pada kondisi topografi berupa dataran rendah dan pesisir dapat terjadi sebagai dampak adanya pemanfaatan kawasan ruang. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya kejadian-kejadian bencana hidrometrologis seperti banjir dan abrasi wilayah pesisir sehingga akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat terutama yang tinggal di kawasan pesisir.

Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dengan komunitas pemerhati lingkungan yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana meliputi peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, pengembangan data dan informasi terkait dengan kondisi lingkungan,

rancang ulang seluruh aspek-aspek program pembangunan sehingga bersifat adaptif dan responsif terhadap kondisi lingkungan.

Isu yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup antara lain belum optimalnya penyediaan air bersih khususnya di wilayah pedesaan; belum optimalnya pengelolaan sampah dan masih belum tertanggulangi secara optimal pencemaran lingkungan karena limbah B3. Lokasi pencemaran lingkungan karena limbah B3 terdapat di Kawasan sentra industri logam di Desa Pesarean yang sudah sangat tercemar oleh polusi logam berat. Terdapat beberapa industri yang berkontribusi pada hal ini. Industri peleburan logam (timah dan timbal) masih bersifat tradisional dengan menggunakan tungku bakar manual yang belum memakai cerobong asap. Selain menimbulkan polusi udara, sebenarnya asap yang mengandung logam tersebut dapat dimanfaatkan untuk diambil kembali kandungan logamnya. Selain itu, limbah peleburan hanya ditumpuk di halaman, yang ketika hujan turun akan larut kandungannya ke dalam tanah. Industri daur ulang aki juga memberikan kontribusi yang signifikan pada pencemaran yang ada, karena sifatnya yang masih tradisional dan pembuangan limbahnya (air aki merupakan asam keras yang mengandung larutan logam) ke sungai. Akibatnya, airtanah di kawasan sentra industri logam Pesarean sudah tidak sehat lagi untuk digunakan. Dari sekitar 150 pengusaha cor logam, hanya ada 12 usaha yang sudah bersifat ramah lingkungan. Sementara itu di Kecamatan Margasari terdapat industri pengolahan kapur (pembakaran kapur) yang menggunakan oli bekas sebagai bahan bakarnya. Industri ini sangat polutif dan mencemari lingkungan sekitarnya. Dari sekitar 50 usaha, hanya ada 2 usaha yang tidak polutif karena sudah menggunakan tobong yang merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tegal. Mengingat harga tobong relatif mahal (sekitar Rp. 650 juta untuk tiap tobong), maka pemerintah tidak dapat memberikan tobong pada semua pengusaha.

Isu lain terkait lingkungan hidup adalah menurunnya kualitas lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Tegal, kerusakan yang terjadi antara lain sedimentasi muara sungai, erosi dan abrasi garis pantai, kerusakan *mangrove*, dan kerusakan terumbu karang. Permasalahan tersebut terjadi baik akibat faktor manusia yang kurang bijak dalam mengelola ekosistem (perusakan dan alih fungsi) maupun karena faktor alam (arus, gelombang, angkutan sedimen). Selain masalah tersebut, di wilayah pesisir juga terjadi fenomena tanah timbul (akresi) yang perlu dikelola secara tepat agar tidak merugikan lingkungan sekitar. Permasalahan lingkungan di pesisir berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, karena dapat menimbulkan kerentanan wilayah pesisir terhadap ancaman bencana alam yaitu banjir, erosi dan abrasi pantai. Sejak Tahun 2010 Pantai utara (pantura) Jawa Tengah terus digerus

abrasi. Hingga saat ini luas areal yang hilang dari Brebes hingga Rembang mencapai lebih 4.000 hektare (ha). Rata-rata daratan yang terseret arus laut 5-30 meter per tahun. Abrasi itu mengakibatkan rusak dan hilangnya hutan bakau (mangrove), perkebunan rakyat, areal pertambakan, dan permukiman penduduk yang berada di bibir pantai.

4.2.6 Penguatan Daya Saing Ekonomi Lokal, Industri Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual

Posisi Kabupaten Tegal dalam konstelasi kewilayahan yang merupakan simpul (hub) dalam kegiatan perekonomian regional khususnya di wilayah pantai utara Jawa harus memiliki daya saing ekonomi lokal yang handal. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang tepat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, manajemen pengelolaan kota yang efektif dan peningkatan daya tarik kota. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah diperlukan inovasi dan kreativitas daerah dalam berbagai aspek dan skala inovasi dan kreativitas daerah meliputi lokal, maupun nasional. Dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi di Kabupaten Tegal diperlukan keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk pedagang informal baik melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja.

Pengembangan inovasi dan kreativitas daerah harus didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana berbasis ilmu pengetahuan dengan mengutamakan penelitian, teknik rekayasa dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual. Dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis, efektif, efisien dan terpadu. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar masyarakat Kabupaten Tegal menguasai iptek serta mampu menjawab tantangan pada era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual, dan emosional.

Pemicu inovasi yang cukup penting di antaranya adalah lembaga litbang yang dibangun pada tahap sebelumnya. Namun dibutuhkan program khusus untuk melakukan penguatan terhadap lembaga ini sehingga dapat lebih berperan dalam proses pembangunan sistem inovasi. Pola pemikiran terhadap keberadaan lembaga litbang ini bukan hanya beranjak dari apa yang sekarang ada, tetapi untuk menjawab tuntutan kebutuhan apa yang harus dipenuhi pada masa yang akan datang. Intensitas berkreasi dan berinovasi pada akhir tahapan ini diharapkan telah bergeser dan berkembang menjadi budaya kreasi dan inovasi. Hal ini didukung dengan pemunculan keunikan lokal.

Keragaman potensi masyarakat Kabupaten Tegal perlu diarahkan menjadi suatu potensi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Potensi masyarakat terutama yang mengandung muatan budaya atau kearifan lokal perlu lebih didayagunakan. Potensi ini perlu dilengkapi dengan kesadaran tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI menjadi perangsang sekaligus pelindung terhadap kejahatan pencurian/perampasan terhadap karya intelektual, budaya atau kearifan lokal.

4.2.7 Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal

Kabupaten Tegal yang berlokasi pada simpul persinggahan mobilitas antar daerah khususnya di lingkup pantai utara Jawa dengan kondisi topografi yang heterogen memiliki karakteristik budaya lokal yang unik dan potensi wisata yang layak dikembangkan. Kekayaan budaya dan pariwisata yang tumbuh dan berkembang harus disikapi dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tegal yang harmonis dalam keragaman budaya, agama, suku dan ras. Sejalan dengan berkembangnya kehidupan masyarakat Kabupaten Tegal yang semakin terpengaruh oleh budaya modern, budaya lokal harus tetap dipelihara dan dikembangkan dengan mengaplikasikannya ke dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pembangunan karakteristik kewilayahan.

Potensi pariwisata di Guci, Purwahamba dan Cacaban perlu mendapat perhatian yang serius. Kerjasama dengan pihak ketiga atau investor merupakan salah satu upaya yang sebaiknya dilaksanakan untuk mengembangkan potensi wisata yang ada. Isu lain terkait pengembangan pariwisata adalah akan berakhirnya kontrak pemanfaatan sarana di obyek wisata Guci pada 5 (lima) tahun ke depan. Perlu ada kebijakan untuk mengantisipasi hal tersebut, baik dari sisi legalitas kerjasama maupun *action plan* pemanfaatan sarana prasarana oleh Pemerintah Kabupaten Tegal

Isu terkait dengan budaya dan kearifan lokal adalah perlunya upaya menggali nilai nilai luhur yang ada di masyarakat yang mengedepankan pengetahuan, seni, budaya, bahasa Tegal dan industri kreatif melalui pengembangan strategi kebudayaan sebagai sarana pembinaan mental yang

berbudi luhur yang dibarengi dengan pengembangan nilai-nilai tradisi, sejarah dan kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, yang didukung dengan pengembangan sistem informasi budaya, tanpa mengesampingkan upaya pelestarian dan pengembangan potensi budaya lokal.

4.2.8 Penanggulangan Permasalahan Sosial

Meningkatnya dinamika demografi di wilayah Kabupaten Tegal berdampak pada tumbuhnya permasalahan sosial di kalangan masyarakat. Pertumbuhan penduduk, mobilitas penduduk dan persebaran penduduk serta gaya hidup penduduk yang dipengaruhi faktor alami dan perubahan sosial dalam skala eksternal menyisakan permasalahan kependudukan dalam konteks sosio demografi. Untuk itu diperlukan adanya pengendalian kependudukan yang dilakukan secara sistematis dengan pola tepat dan memperhatikan aspek struktur, jumlah, kualitas, serta distribusi penduduk untuk mengantisipasi permasalahan sosial yang berkembang pesat di kalangan penduduk Kabupaten Tegal.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia, dan tata laksana, serta peningkatan sistem pelayanan sosial dalam rangka mengendalikan dan mengatasi permasalahan sosial kemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada kerjasama antar stakeholders daerah dalam upaya penanggulangan permasalahan sosial.

4.2.9 Reformasi Birokrasi

Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Tegal maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melalui reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan pengembangan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga-lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat. Pemerintah daerah harus melakukan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu wujudnya berupa penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik.

4.2.10 Pertanian dan Ketahanan Pangan

Salah isu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mewujudkan ketahanan pangan. Hal tersebut dikarenakan dengan pengelolaan ketahanan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas

ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan serta ketahanan nasional. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang relatif pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktik pertanian konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian.

Sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Tegal maka sektor pertanian menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian serta pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Disamping itu perlu diupayakan ketersediaan dan kesehatan pangan, akses atau keterjangkauan pangan, serta distribusi dan diversifikasi pangan. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya sinergitas pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat petani.

4.2.11. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk mendukung kinerja pembangunan di Kabupaten Tegal diperlukan sumber dana pembangunan yang signifikan. Meskipun besaran APBD Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun cenderung meningkat namun belum mampu membiayai pembangunan secara keseluruhan sesuai kebutuhan. Seiring dengan penerapan prinsip *good governance*, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah harus semakin ditingkatkan.

Pengelolaan keuangan daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan perlu dilakukan melalui keterlibatan peran serta masyarakat yang proporsional untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, diperlukan dukungan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana pemerintahan yang handal. Beberapa permasalahan dan potensi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK; Pengelolaan dan penataan aset daerah khususnya aset tetap belum mendapat opini wajar dari BPK; dan belum adanya koordinasi dan kesamaan pandang dalam permasalahan dan penanganan aset daerah khususnya aset tetap.

4.2.12 Pengembangan Industri

Pertumbuhan ekonomi daerah perlu didukung oleh sector-sektor yang sesuai dengan karakteristik perekonomian lokal. Sektor industri merupakan salah satu sektor perekonomian yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten

Tegal. Untuk itu diperlukan adanya dukungan dari pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan dan perkembangannya. Pengembangan industri harus selaras dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran agar dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui upaya penguatan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia dan iklim usaha yang kondusif.

Daya saing produk IKM mengalami tekanan terutama karena bahan baku produksi (plat baja) mahal, sedangkan daya beli IKM terbatas dan belum ada korporasi IKM yang mampu menjadi pemasok kebutuhan bahan baku IKM. Diperlukan kebijakan untuk membentuk Tegal Steel Center (Pusat Material Logam Tegal) yang langsung bermitra dengan PT Krakatau Steel atau perusahaan lain yang menyediakan bahan baku plat baja. Tujuan pembentukan Tegal Steel Center adalah memastikan ketersediaan bahan baku plat baja untuk menunjang IKM pengolahan logam.

Industri makanan kecil di Kabupaten Tegal terpusat di Kecamatan Adiwerna dan Pangkah, sedangkan kuliner khas Tegal yaitu sate kambing dan teh poci tersebar hampir di semua wilayah. Industri makanan kecil ini masih bersifat tradisional dan belum memberikan perhatian serius pada pengemasan, padahal kemasan yang baik akan memberikan nilai tambah pada produk. Pemerintah Kabupaten Tegal sudah memberikan bantuan mengenai proses pengemasan (termasuk alat pengemas), tetapi belum dapat menjangkau seluruh pelaku usaha. Jika hal ini dapat dilakukan dan didukung dengan sistem promosi yang baik (misalnya dengan mengikutkan produk pada pameran-pameran), maka makanan kecil produksi Kabupaten Tegal akan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Di sisi lain, pemasaran makanan khas Kabupaten Tegal masih dilakukan secara parsial. Kuliner khas Tegal (sate kambing dan teh poci) akan sangat menjual jika dikemas dengan industri pariwisata dan menjadikannya sebagai wisata kuliner. Sayangnya, hal ini masih kurang digarap dengan serius oleh pelaku usaha maupun Pemerintah Kabupaten Tegal.

Industri tenun tradisional utamanya berkembang di Kecamatan Kramat, Dukuhturi, dan Talang. Industri ini memasok kain tenun pada pengepul di Kota Tegal. Sistem kerja pada industri ini adalah semua modal disediakan oleh pengepul, dan penenun mendapat upah sesuai hasil yang berhasil diselesaikan. Sistem ini membuat penenun berada pada posisi yang lemah karena pendapatan yang diperoleh relatif kecil, sedangkan pengepul mendapat keuntungan yang sangat besar.

Kabupaten Tegal tidak memiliki kawasan industri khusus dengan semua mekanisme pendukungnya. Dengan lokasinya yang strategis, Kabupaten Tegal seharusnya memiliki minimal satu kawasan industri. Jalur pantura dan rel KA

sudah tersedia dan seharusnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Kawasan sepanjang jalur pantura juga masih banyak yang belum dimanfaatkan. Modal awal investasi juga dapat diperoleh dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta, karena kawasan industri bukan merupakan *domain* wajib pemerintah. Penduduk usia produktif juga tersedia melimpah. Pada dasarnya, semua potensi untuk mendirikan kawasan industri sudah dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal, dan hal yang perlu dilaksanakan adalah pelaksanaan komitmen dengan serius. Beberapa waktu yang lalu perusahaan Bakrie akan mendirikan kawasan industri dan mencari lokasinya pada wilayah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Karena respons dari Pemerintah Kabupaten Tegal lamban, maka Bakrie menjatuhkan pilihannya pada Kabupaten Brebes. Di masa datang, hal ini tidak boleh terulang karena adanya kawasan industri akan memberikan *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian; tentu saja dengan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan hidup dan aspek sosial.

Hal yang masih kurang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menarik investasi industri diantaranya adalah dukungan sarana dan prasarana yang masih kurang. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah (1) melakukan perbaikan jaringan jalan, drainase, pengolahan limbah, sampah, dan infrastruktur pendukung usaha; (2) melakukan koordinasi dengan PLN untuk menjamin ketersediaan energi listrik; (3) memberikan jaminan alokasi tanah untuk lokasi proyek dengan menyediakan alokasi ruang dalam RTRW Kabupaten Tegal pada lokasi yang strategis, menjamin kejelasan kepemilikan tanah, dan memfasilitasi penyediaan tanah jika memungkinkan; (4) memberikan jaminan kepastian keamanan berusaha (menghilangkan pungli dan ekonomi biaya tinggi); serta (5) memberikan subsidi pajak dan retribusi selama jangka waktu tertentu (diperkirakan hingga BEP); setelah itu pajak dan retribusi dibayarkan secara normal.